



## Pedagang Jalan Perwakilan Khawatir Digusur

**YOGYA, TRIBUN** - Rencana pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membangun Jogja Planning Gallery (JPG) membuat sejumlah pihak khawatir. Khususnya, para pedagang di sekitar Jalan Perwakilan, kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta.

Hal ini lantaran Jogja Planning Gallery bakal direalisasikan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Nantinya, gedung DPRD DIY bakal diubah sebagai ruang pentas dan menjadi galeri.

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan, Adi Kusuma Putra Suryawan menjelaskan, pihaknya menerima undangan sosialisasi pengosongan kios sisi utara Jalan Perwakilan secara mendadak pada 24 Oktober 2022. Sosialisasi kemudian dilaksanakan pada 26 Oktober.

Pemkot Yogyakarta diberi tenggat sampai akhir tahun ini oleh pihak Keraton Yogyakarta agar kios-kios di Jalan Perwakilan dikosongkan. Dalam sosialisasi, Adi menyebut bahwa pemerintah belum menyebutkan peruntukkan kios tersebut ke depannya untuk

apa. Padahal rencana pembangunan Jogja Planning Gallery baru akan dilaksanakan pada 2024.

"Menanggapi informasi yang minim dan mendadak tersebut kami para pedagang kios telah membuat surat pernyataan dan permohonan, khususnya pada Raja kami Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pimpinan Panitikismo, dan Pemkot Jogja agar memberi kami perpanjangan waktu untuk mengosongkan kios," kata Adi, Selasa (1/11).

Pihaknya menyebut, dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan oleh para pedagang sampai saat ini. Menurutnya perekonomian belum sepenuhnya pulih. Aktivitas ekonomi di kawasan itu juga sempat terhenti sementara selama tiga bulan dampak revitalisasi pedestrian Jalan Perwakilan.

Para pedagang mengaku bahwa tempat tersebut merupakan satu-satunya lokasi mencari penghidupan. Sehingga rencana pengusuran buntut dari rencana pembangunan Jogja Planning Gallery membuat pedagang waswas.

"Atas mendadakunya sociali-

sasi yang kami dapat, membuat kami tidak mempunyai persiapan apapun. Kami mohon diberikan perpanjangan waktu untuk kami dapat menabung dan bersiap dalam mencari alternatif penghidupan lain supaya kami juga dapat memenuhi tanggung jawab kami di lembaga-lembaga keuangan," ucapnya.

Adi juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan tempat relokasi dan kompensasi agar pedagang dapat melanjutkan aktivitas berjualan jika pengusuran jadi dilaksanakan. Namun jika pemerintah memberi waktu sampai 2024, sesuai dengan rencana pembangunan JPG pedagang mengaku akan mengosongkan kios secara sukarela dan tidak meminta kompensasi.

"Kiranya, waktu yang akan diberikan hingga tahun 2024 tersebut merupakan waktu yang tepat dan baik untuk kami kedepannya dapat mencari alternatif lain dalam kami berusaha, meskipun tempat usaha alternatif yang baru kedepannya tidak akan sama dengan tempat jualan kami saat ini," pungkasnya. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005